Membangun Kampus Aman: Peran PPKPT dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi Terkait Penyalahgunaan Relasi Kuasa di Universitas Bangka Belitung

Raffel Bryllion Patinasaranie, Bangka Belitung
raffelbryllion@gmail.com
Rahmad Agung Ath-Thaariq, Bangka Belitung
rahmadagung22@gmail.com
Rehan Abid, Bangka Belitung
rehanabid12345678910@gmail.com
Reysa Aulia, Bangka Belitung
reysa1208@gmail.com
Dymas Vathir Ar Rahman, Bangka Belitung
dymasvvv@gmail.com
Keisya Alfiyah Putri, Bangka Belitung
keisyaalfiyahputri@gmail.com

Abstract

Abuse of power relations is one of the issues that can hinder the creation of a safe and conducive higher education environment. Differences in position, experience, and authority within the campus environment, particularly in student organizations, can develop into abuse of power relations when they are used to exert pressure, intimidation, or actions that undermine human dignity. This study aims to understand the forms of abuse of power relations at Universitas Bangka Belitung (UBB) and to analyze the role of the Task Force for the Prevention and Handling of Violence in Higher Education (PPKPT) in preventing and handling violence. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The primary data were obtained through a semi-structured interview with one member of the UBB PPKPT Task Force, supported by literature review and documentation. The findings show that seniority in student organizations is essentially related to differences in experience and organizational development. However, it can become an abuse of power relations when it is used to exert pressure, intimidation, physical punishment, or actions that undermine human dignity. Organizational cultures that normalize inappropriate actions on the grounds of tradition or habit can also strengthen the abuse of power relations. The PPKPT plays a role in socialization, receiving reports, and preventing and handling violence. However, its implementation still faces challenges, including limited socialization, unclear boundaries of authority, limited resources, and the validation and handling of reports. Therefore, building a safe campus requires an egalitarian organizational culture, students' understanding of their rights and reporting channels, and accessible prevention and handling mechanisms that uphold confidentiality and the dignity of all parties.

Keywords: *power relations, seniority, violence, PPKPT, higher education*, Universitas Bangka Belitung.

Abstrak

Penyalahgunaan relasi kuasa merupakan salah satu persoalan yang dapat menghambat terciptanya lingkungan perguruan tinggi yang aman dan kondusif. Perbedaan kedudukan, pengalaman, dan kewenangan dalam lingkungan kampus, khususnya organisasi mahasiswa, dapat berkembang menjadi penyalahgunaan relasi kuasa apabila digunakan untuk memberikan tekanan, intimidasi, atau tindakan yang merendahkan martabat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk penyalahgunaan relasi kuasa di lingkungan Universitas Bangka Belitung (UBB) serta menganalisis peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) dalam mencegah dan menangani kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data utama diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan satu orang anggota Satgas PPKPT UBB, yang didukung oleh studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa senioritas dalam organisasi mahasiswa pada dasarnya merupakan perbedaan pengalaman dan proses kaderisasi, tetapi dapat berubah menjadi penyalahgunaan relasi kuasa apabila digunakan untuk memberikan tekanan, intimidasi, hukuman fisik, atau tindakan yang merendahkan martabat. Budaya organisasi yang menormalisasi tindakan dengan alasan tradisi atau kebiasaan juga dapat memperkuat penyalahgunaan relasi kuasa. PPKPT memiliki peran dalam sosialisasi, penerimaan laporan, serta pencegahan dan penanganan kekerasan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa belum optimalnya sosialisasi, batas kewenangan, keterbatasan sumber daya, serta proses validasi dan penanganan laporan. Oleh karena itu, pembangunan kampus yang aman membutuhkan budaya organisasi yang egaliter, pemahaman mahasiswa mengenai hak dan saluran pengaduan, serta mekanisme pencegahan dan penanganan yang mudah diakses dan menjunjung kerahasiaan serta martabat setiap pihak.

Kata kunci: relasi kuasa, senioritas, kekerasan, PPKPT, perguruan tinggi, Universitas Bangka Belitun

A. **Pendahuluan**

Perguruan tinggi merupakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang bagi mahasiswa dan seluruh sivitas akademika untuk berinteraksi dan berkembang. Dalam proses tersebut terdapat hubungan yang memiliki perbedaan kedudukan, kewenangan, pengalaman, dan pengaruh, sehingga dapat membentuk relasi kuasa antara satu pihak dengan pihak lainnya. Relasi kuasa sebenarnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial, tetapi dapat menjadi persoalan apabila kewenangan atau pengaruh digunakan secara tidak semestinya. Ketimpangan posisi dalam hubungan tertentu dapat membuat pihak yang berada pada posisi lebih rendah menjadi lebih rentan ketika terjadi tindakan yang merugikan atau kekerasan (Yanto, D., Holish, A. M., & Setiawan, 2019).[1] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan relasi kuasa merupakan persoalan yang perlu diperhatikan dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana penyalahgunaan relasi kuasa dapat terjadi di Universitas Bangka Belitung (UBB) dan bagaimana PPKPT berperan dalam mencegah serta menangani permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami permasalahan penyalahgunaan relasi kuasa dan mengkaji peran PPKPT dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan sivitas akademika dalam meningkatkan pemahaman mengenai relasi kuasa yang sehat serta menjadi masukan bagi UBB untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan.

Permasalahan penyalahgunaan relasi kuasa perlu mendapat perhatian karena hubungan yang bersifat hierarkis dapat ditemukan dalam berbagai kegiatan di perguruan tinggi, baik dalam kegiatan akademik, organisasi, maupun aktivitas kemahasiswaan. Adanya perbedaan kedudukan tidak berarti bahwa penyalahgunaan relasi kuasa selalu terjadi, tetapi kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko apabila kewenangan atau pengaruh digunakan untuk menekan, mengendalikan, atau memperlakukan pihak lain secara tidak semestinya. Penanganan persoalan kekerasan di perguruan tinggi membutuhkan mekanisme yang jelas agar warga kampus memiliki ruang yang aman untuk memperoleh perlindungan dan menyampaikan permasalahan yang dialami

[1] Yanto, D., Holish, A. M., & Setiawan, H. D. (2023). *Legal Protection for Victims of Harassment in a Victimological Perspective (Case Study of Harassment in Higher Education Institutions)*. Law Research Review Quarterly, 9(2). https://doi.org/10.15294/lrrq.v9i2.65795

(Hermawati, Y., Widiyanto, W., Santoso, E., & Nuryanti, 2023).[2] Selain itu, penerapan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga diperlukan penguatan dalam pelaksanaan dan kelembagaan yang ada (Rahmasari, H., Pradityo, R., Karinda, R., Sitepu, S., & Widyawati, 2018).[3] Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimana penyalahgunaan relasi kuasa dapat muncul di lingkungan UBB dan bagaimana PPKPT menjalankan perannya dalam melakukan pencegahan serta penanganan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan relasi kuasa dan mengetahui upaya yang dilakukan PPKPT dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara akademis dengan menambah pemahaman mengenai relasi kuasa di lingkungan perguruan tinggi dan secara praktis menjadi bahan masukan bagi UBB dalam memperkuat mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan.

Pembangunan lingkungan perguruan tinggi yang aman membutuhkan dukungan dari kebijakan, mekanisme kelembagaan, dan kesadaran seluruh sivitas akademika. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi sebagai salah satu dasar dalam penyelenggaraan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2024).[4] Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan merupakan bagian yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kajian mengenai penanganan kekerasan di perguruan tinggi juga menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan dan pelaksanaan kebijakan masih menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman(State Institution and Socio Analysis on Sexual Violence in Higher Education. (2026), 2026). [5]Atas dasar kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan rumusan masalah pada bagaimana PPKPT berperan dalam mencegah

[2] Hermawati, Y., Widiyanto, W., Santoso, E., & Nuryanti, N. (2023). *The Framework of Handling Sexual Violence in Indonesian Universities*. Komunitas, 15(2). https://doi.org/10.15294/komunitas.v15i2.47668
[3] Rahmasari, H., Pradityo, R., Karinda, R., Sitepu, S., & Widyawati, A. (2023). *Policies on Prevention and Repression Against Sexual Violence for Higher Education: The Challenges and Expectations*. Indonesian Journal of Criminal Law Studies, 8(1). https://doi.org/10.15294/ijcls.v8i1.36753
[4] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi*.
[5] Achmad, A., & Adlhiyati, Z. (2026). *State Institution and Socio Analysis on Sexual Violence in Higher Education*. Pandecta Research Law Journal, 21(1). https://doi.org/10.15294/pandecta.v21i1.25693

dan menangani penyalahgunaan relasi kuasa di UBB serta bagaimana peran tersebut dapat mendukung terciptanya kampus yang aman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PPKPT dalam pencegahan dan penanganan serta mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan bagi sivitas akademika. Adapun manfaat penelitian diharapkan dapat dirasakan oleh UBB sebagai bahan evaluasi dalam memperkuat sistem pencegahan dan penanganan, oleh mahasiswa dan sivitas akademika sebagai tambahan pemahaman mengenai relasi kuasa dan lingkungan kampus yang aman, serta oleh peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi untuk penelitian mengenai relasi kuasa dan kekerasan di perguruan tinggi.

B. **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai penyalahgunaan relasi kuasa serta peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) dalam upaya pencegahan dan penanganannya di Universitas Bangka Belitung (UBB).[6] Penelitian berfokus pada informasi yang diperoleh secara langsung dari informan mengenai kondisi, upaya, dan mekanisme yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

Informan dalam penelitian ini berjumlah satu orang, yaitu anggota Satgas PPKPT Universitas Bangka Belitung. Informan dipilih secara purposive karena memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam pelaksanaan tugas Satgas PPKPT. [7]Data utama diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara membahas pemahaman mengenai relasi kuasa, potensi penyalahgunaan relasi kuasa di lingkungan kampus, upaya pencegahan, mekanisme penanganan, kendala yang dihadapi, serta langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman. Dalam proses wawancara, penelitian tidak meminta informan untuk mengungkapkan identitas maupun informasi pribadi pihak yang terlibat dalam kasus tertentu.

Selain wawancara, penelitian menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi sebagai data pendukung. [8]Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber akademik yang relevan dengan relasi kuasa serta pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Data hasil wawancara dianalisis secara deskriptif dengan mengelompokkan informasi berdasarkan beberapa tema, yaitu pemahaman mengenai relasi kuasa, potensi penyalahgunaan relasi kuasa, upaya pencegahan, mekanisme penanganan, kendala Satgas PPKPT, dan upaya penguatan pencegahan.[9] Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian untuk menggambarkan pandangan dan informasi dari informan mengenai

[6] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022).
[7] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022).
[8] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021).
[9] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014).

peran Satgas PPKPT dalam mendukung terciptanya lingkungan Universitas Bangka Belitung yang aman.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Batas Senioritas yang Wajar dalam Organisasi Mahasiswa

Berdasarkan hasil wawancara, senioritas dalam organisasi mahasiswa pada dasarnya merupakan konsekuensi dari adanya perbedaan waktu bergabung dan pengalaman dalam organisasi. Senior memiliki pengalaman, jam terbang, dan pengetahuan organisasi yang lebih dahulu diperoleh dibandingkan junior. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menempatkan senior sebagai pihak yang memiliki derajat lebih tinggi daripada junior. Narasumber menjelaskan bahwa perbedaan antara senior dan junior seharusnya hanya terletak pada pengalaman dan proses keterlibatan dalam organisasi, sedangkan dalam aspek kemanusiaan keduanya tetap memiliki kedudukan yang sama dan harus saling menghormati.

Narasumber juga menjelaskan bahwa batas senioritas dapat dilihat dari kultur organisasi yang berkembang. Organisasi dengan kultur egaliter menempatkan senioritas sebagai bagian dari pengalaman dan kebijaksanaan, bukan sebagai dasar untuk membentuk perbedaan derajat. Senior dan junior tetap dapat berkolaborasi tanpa menjadikan posisi senior sebagai sumber otoritas mutlak.

Dengan demikian, senioritas yang wajar dalam organisasi mahasiswa dapat dipahami sebagai hubungan yang berorientasi pada pengalaman, pembinaan, dan kaderisasi. Senior dapat memberikan arahan kepada junior, tetapi hubungan tersebut tetap harus dilandasi penghormatan terhadap hak dan martabat setiap anggota.

2. Penyalahgunaan Senioritas sebagai Bentuk Relasi Kuasa

Hasil wawancara menunjukkan bahwa senioritas dapat berubah menjadi relasi kuasa ketika terdapat tekanan dari pihak yang memiliki posisi lebih tinggi kepada pihak yang berada di posisi lebih rendah. Narasumber menjelaskan bahwa penetrasi, hegemoni, atau tekanan dari pihak atas kepada pihak bawah menunjukkan adanya kultur organisasi yang bersifat vertikal. Dalam kondisi tersebut, senioritas tidak lagi hanya menunjukkan perbedaan pengalaman, tetapi dapat berkembang menjadi hubungan yang menyerupai hierarki atau kasta.

Relasi kuasa menjadi semakin bermasalah ketika posisi senior digunakan untuk melakukan penindasan, intimidasi, hukuman fisik, atau tindakan yang menghilangkan martabat seseorang. Narasumber menegaskan bahwa apabila hubungan senior-junior telah menghasilkan tindakan tersebut, persoalannya bukan lagi sekadar mengenai senioritas, tetapi telah masuk pada hubungan yang tidak manusiawi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan senioritas tidak secara otomatis menjadi masalah. Persoalan muncul ketika perbedaan pengalaman digunakan untuk membenarkan tekanan atau tindakan terhadap anggota lain. Oleh karena itu, kultur organisasi menjadi faktor penting dalam menentukan apakah senioritas berjalan sebagai proses kaderisasi atau berubah menjadi penyalahgunaan relasi kuasa.

3. Normalisasi Kekerasan melalui Budaya Organisasi

Dalam wawancara, ditemukan pula gambaran mengenai proses normalisasi tindakan yang sebenarnya menimbulkan ketidaknyamanan. Ketika seseorang menyampaikan bahwa dirinya merasa tidak nyaman, terdapat kemungkinan tindakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang sudah biasa dilakukan karena telah menjadi kebiasaan sejak dahulu. Bahkan, tindakan yang tidak pantas dapat dianggap sebagai candaan atau bagian dari tradisi organisasi. Dalam kondisi tertentu, tindakan tersebut dapat mengarah pada pelecehan atau kekerasan fisik ketika seseorang tidak mengikuti arahan senior.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya organisasi dapat berperan dalam mempertahankan perilaku yang tidak sesuai apabila suatu tindakan terus dibenarkan dengan alasan tradisi atau kebiasaan. Pernyataan bahwa tindakan tersebut "sudah dari dulu" tidak dengan sendirinya menghilangkan dampak yang dirasakan oleh anggota yang menjadi pihak yang mengalami tindakan tersebut.

Oleh karena itu, organisasi mahasiswa perlu membedakan antara tradisi organisasi yang bersifat positif dengan kebiasaan yang dapat menimbulkan tekanan, intimidasi, atau kekerasan. Senioritas tidak seharusnya menjadi alasan untuk mempertahankan tindakan yang merendahkan martabat atau membuat anggota merasa tidak aman.

4. Hak Mahasiswa atas Lingkungan Kampus yang Aman dan Kondusif

Wawancara menunjukkan bahwa persoalan relasi kuasa dalam organisasi mahasiswa juga berkaitan dengan hak mahasiswa sebagai bagian dari lingkungan perguruan tinggi. Narasumber menjelaskan bahwa mahasiswa yang telah terdaftar sebagai bagian dari perguruan tinggi memiliki hak dan kewajiban. Salah satu hak yang ditekankan adalah memperoleh pendidikan dalam suasana yang nyaman, kondusif, dan egaliter.

Dalam konteks tersebut, mahasiswa tidak seharusnya ditempatkan hanya sebagai objek yang harus menerima keputusan atau tindakan pihak yang memiliki posisi lebih tinggi. Narasumber menekankan bahwa mahasiswa merupakan subjek di lingkungan kampus dan memiliki hak untuk memperoleh suasana belajar yang nyaman serta mengembangkan pengetahuan dengan baik.

Pandangan tersebut memperkuat hasil wawancara sebelumnya mengenai pentingnya kultur egaliter. Hubungan antara senior dan junior maupun antara mahasiswa dengan pihak lain di lingkungan kampus tetap harus memperhatikan hak dan martabat mahasiswa sebagai individu.

5. Mekanisme Pelaporan Kekerasan di Lingkungan Kampus

Berdasarkan wawancara, penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya mencakup kekerasan seksual, tetapi juga berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan verbal, nonverbal, fisik, nonfisik, dan aspek yang berkaitan dengan kondisi mental. Narasumber menjelaskan bahwa keberadaan regulasi kemudian melahirkan struktur dan fungsi satuan tugas untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi.

Mahasiswa yang mengalami kekerasan dapat menyampaikan laporan kepada PPKPT melalui mekanisme yang tersedia. Narasumber menyampaikan bahwa salah satu pekerjaan penting PPKPT adalah melakukan sosialisasi mengenai keberadaan lembaga tersebut dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai cara melapor. Proses pelaporan diharapkan dapat dilakukan dengan nyaman dan bebas, dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan informasi serta proses penanganan yang tetap mempertimbangkan pihak pelapor maupun pihak terlapor.

Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman. Keberadaan saluran pelaporan perlu diikuti dengan pengetahuan mahasiswa mengenai kapan dan bagaimana mereka dapat menggunakan saluran

tersebut.

6. Tantangan dalam Penanganan Laporan oleh PPKPT

Hasil wawancara juga menunjukkan adanya sejumlah tantangan dalam pelaksanaan tugas PPKPT. Narasumber menjelaskan bahwa kepengurusan PPKPT periode 2026–2028 masih relatif baru sehingga masih terdapat proses penguatan kelembagaan. Salah satu tantangan yang disebutkan adalah belum optimalnya kehadiran lembaga secara inklusif dan belum maksimalnya sosialisasi mengenai mekanisme pelaporan. Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap keberanian atau kenyamanan mahasiswa dalam menyampaikan laporan.

Tantangan lainnya berkaitan dengan batas kewenangan PPKPT dalam melakukan berbagai tindakan, seperti mediasi, penanganan, penindakan, maupun tindakan awal berupa penjagaan. Narasumber juga menjelaskan bahwa persoalan penafsiran aturan, pasal yang bersifat umum, serta keterbatasan dalam menentukan posisi lembaga dapat menjadi tantangan dalam proses penyelesaian kasus.

Selain itu, terdapat tantangan manajerial karena anggota PPKPT berasal dari unsur internal kampus dengan tugas utama masing-masing, seperti dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Penanganan suatu laporan membutuhkan waktu, konsentrasi, pemeriksaan bukti, serta proses klarifikasi sehingga pelaksanaan tugas tersebut tidak selalu mudah.

Narasumber secara terbuka menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan selama sekitar setengah tahun, beberapa laporan telah ditindaklanjuti, tetapi sebagian proses masih berada pada tahap validasi dan belum sampai pada keputusan. Hal tersebut dipandang sebagai bagian dari evaluasi dan autokritik terhadap pelaksanaan tugas PPKPT.

7. Pentingnya Keberanian Mahasiswa untuk Melaporkan Ketidaknyamanan

Wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa perlu mengetahui batas ketika suatu kondisi sudah menimbulkan ketidaknyamanan dan kapan membutuhkan bantuan. Narasumber menekankan bahwa mahasiswa tidak berada dalam posisi sendirian ketika menghadapi permasalahan di lingkungan kampus. Terdapat berbagai unsur dan struktur akademik yang dapat menjadi tempat memperoleh bantuan, seperti staf akademik, pihak program studi, maupun pihak fakultas.

Narasumber juga menegaskan bahwa mahasiswa merupakan subjek di lingkungan kampus dan memiliki hak yang harus dihormati. Apabila mahasiswa ingin belajar dengan nyaman tetapi mengalami gangguan yang berasal dari individu, sistem, aktor tertentu, maupun kebiasaan yang berkembang di lingkungan kampus, mahasiswa dianjurkan untuk menyampaikan pengaduan melalui saluran yang tersedia.

Dalam praktiknya, jalur pengaduan dapat dimulai dari pihak program studi dan kemudian diarahkan kepada tingkat fakultas atau PPKPT apabila persoalan yang dihadapi membutuhkan penanganan lebih lanjut. Narasumber juga menyebutkan adanya media pengaduan seperti tautan dan materi informasi yang disediakan untuk membantu mahasiswa menyampaikan laporan.

8. Keterkaitan Relasi Kuasa dengan Upaya Membangun Kampus Aman

Jika hasil wawancara tersebut dilihat secara keseluruhan, terdapat keterkaitan antara budaya senioritas, relasi kuasa, dan mekanisme penanganan kekerasan di lingkungan kampus. Senioritas yang didasarkan pada pengalaman dapat berjalan secara positif apabila berada dalam kultur egaliter. Sebaliknya, ketika senioritas digunakan untuk memberikan tekanan, intimidasi, hukuman fisik, atau tindakan yang merendahkan martabat, hubungan tersebut dapat berkembang menjadi penyalahgunaan relasi kuasa.

Ketika tindakan tersebut terjadi, keberadaan mekanisme pelaporan menjadi penting agar mahasiswa memiliki akses untuk menyampaikan pengalaman dan memperoleh penanganan. PPKPT menjadi salah satu bagian dari mekanisme kelembagaan yang dapat digunakan mahasiswa, sementara jalur akademik seperti program studi dan fakultas juga dapat menjadi tempat awal untuk menyampaikan persoalan.

Dengan demikian, membangun kampus yang aman tidak hanya berkaitan dengan penanganan ketika kekerasan telah terjadi, tetapi juga dengan pencegahan melalui pembentukan kultur organisasi yang egaliter. Senioritas perlu diposisikan sebagai perbedaan pengalaman, bukan perbedaan derajat. Pada saat yang sama, mahasiswa perlu mengetahui haknya, memahami saluran pengaduan yang tersedia, dan memiliki akses terhadap mekanisme penanganan yang menjunjung kerahasiaan serta proses yang berimbang.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pencegahan penyalahgunaan

relasi kuasa membutuhkan keterlibatan berbagai unsur di lingkungan kampus. Budaya organisasi yang menghormati kesetaraan perlu berjalan bersama dengan mekanisme pelaporan dan penanganan yang dapat diakses mahasiswa. Dengan kombinasi tersebut, lingkungan kampus dapat diarahkan menjadi ruang pendidikan yang nyaman, kondusif, dan menghormati hak serta martabat setiap mahasiswa.

D. **Penutup**

1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai batas senioritas, penyalahgunaan relasi kuasa, serta mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus, dapat disimpulkan bahwa senioritas dalam organisasi mahasiswa pada dasarnya merupakan bagian dari proses organisasi yang muncul karena adanya perbedaan waktu bergabung dan pengalaman. Senioritas masih berada dalam batas yang wajar apabila ditempatkan dalam kultur yang egaliter, sehingga perbedaan senior dan junior hanya berkaitan dengan pengalaman, pengetahuan, dan proses kaderisasi, bukan perbedaan derajat atau hak sebagai manusia.

Permasalahan muncul ketika posisi senior digunakan untuk memberikan tekanan, intimidasi, hukuman fisik, atau tindakan yang merendahkan martabat anggota lain. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan relasi kuasa yang dapat diperkuat oleh budaya organisasi yang menormalisasi tindakan tertentu dengan alasan tradisi atau kebiasaan. Oleh karena itu, pencegahan kekerasan membutuhkan perubahan kultur organisasi menuju hubungan yang lebih egaliter dan menghormati hak serta martabat setiap mahasiswa.

Penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman. Mahasiswa memiliki akses untuk menyampaikan laporan melalui PPKPT maupun jalur akademik seperti program studi dan fakultas. Proses pelaporan perlu dilakukan dengan memperhatikan kenyamanan, kebebasan, dan kerahasiaan informasi pelapor serta proses yang berimbang bagi pihak yang terlibat. Namun, pelaksanaan mekanisme tersebut masih menghadapi tantangan, antara lain sosialisasi yang belum optimal, kenyamanan pelapor, batas kewenangan, keterbatasan sumber daya, serta proses validasi dan penanganan laporan.

Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terhadap perkembangan keilmuan terletak pada

pemahaman bahwa pencegahan kekerasan di perguruan tinggi tidak dapat hanya dilihat dari aspek penanganan kasus, tetapi juga perlu dikaji melalui hubungan antara kultur organisasi, senioritas, relasi kuasa, hak mahasiswa, dan mekanisme pelaporan. Senioritas perlu ditempatkan sebagai perbedaan pengalaman, sedangkan relasi organisasi perlu dibangun berdasarkan prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Temuan ini dapat menjadi dasar pemahaman bagi pengembangan kajian mengenai relasi kuasa dan pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, khususnya dalam konteks organisasi mahasiswa.

2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam upaya pencegahan serta penanganan kekerasan di lingkungan Universitas Bangka Belitung (UBB).

a. Bagi Pihak Universitas

Pihak universitas diharapkan dapat terus memperkuat komitmen dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan sosialisasi mengenai keberadaan, fungsi, dan mekanisme pelaporan PPKPT kepada seluruh mahasiswa. Selain itu, universitas perlu mendukung pelaksanaan tugas PPKPT melalui penguatan kelembagaan, penyediaan sumber daya yang memadai, serta evaluasi berkala terhadap proses pencegahan dan penanganan laporan kekerasan.

b. Bagi PPKPT UBB

PPKPT diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan pengaduan agar mahasiswa mengetahui tempat dan cara menyampaikan laporan ketika mengalami atau mengetahui adanya dugaan kekerasan. Prinsip kerahasiaan informasi, keamanan pelapor, serta proses penanganan yang objektif dan berimbang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas. PPKPT juga diharapkan terus mengevaluasi kendala yang dihadapi, khususnya dalam sosialisasi, batas kewenangan, pemeriksaan laporan, dan tindak lanjut

penanganan.

c. Bagi Organisasi Mahasiswa

Organisasi mahasiswa diharapkan mampu membangun budaya organisasi yang egaliter dengan menempatkan senioritas sebagai perbedaan pengalaman, bukan sebagai perbedaan kedudukan atau derajat. Proses kaderisasi hendaknya dilakukan melalui pembinaan, pemberian teladan, dan pengembangan kemampuan anggota tanpa menggunakan intimidasi, tekanan, hukuman fisik, maupun tindakan yang merendahkan martabat. Tradisi organisasi juga perlu dievaluasi secara berkala agar tidak menjadi alasan untuk membenarkan perilaku yang merugikan anggota.

d. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa diharapkan memahami hak dan kewajibannya sebagai bagian dari lingkungan perguruan tinggi serta berani menyampaikan ketidaknyamanan ketika menghadapi tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan atau penyalahgunaan relasi kuasa. Mahasiswa dapat mencari bantuan melalui pihak program studi, fakultas, atau PPKPT sesuai dengan kebutuhan dan mekanisme yang tersedia. Selain itu, mahasiswa perlu turut membangun lingkungan organisasi yang saling menghormati, terbuka terhadap perbedaan pendapat, dan tidak menormalisasi tindakan yang merugikan orang lain.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai penyalahgunaan relasi kuasa dan pencegahan kekerasan di perguruan tinggi dengan melibatkan lebih banyak informan, seperti mahasiswa, pengurus organisasi, pihak fakultas, dan anggota PPKPT. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji lebih mendalam efektivitas mekanisme pelaporan, faktor yang memengaruhi keberanian mahasiswa untuk melapor, serta peran budaya organisasi dalam mencegah terjadinya kekerasan. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan kebijakan kampus yang aman dan berkeadilan.

E. Ucapan Terima Kasih

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, karya tulis ilmiah yang berjudul "Membangun Kampus Aman: Peran PPKPT dalam Penanganan dan Pencegahan Kekerasan di Universitas Bangka Belitung" dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan karya tulis ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, kesehatan, kekuatan, dan kelancaran yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan karya tulis ilmiah ini.**

2. **Dosen pengampu mata kuliah dan dosen pembimbing, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang membantu penulis dalam memahami proses penyusunan karya tulis ilmiah secara sistematis dan sesuai dengan kaidah akademik.**

3. **Bapak Sandy Pratama, S.IP., M.Si., selaku narasumber wawancara, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi informasi, pengetahuan, dan pandangan mengenai peran PPKPT dalam penanganan dan pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Informasi yang diberikan menjadi salah satu sumber penting dalam memperdalam pembahasan mengenai senioritas, penyalahgunaan relasi kuasa, mekanisme pelaporan, serta upaya mewujudkan lingkungan kampus yang aman.**

4. **Universitas Bangka Belitung, sebagai lingkungan akademik tempat penulis menempuh pendidikan dan mengembangkan pengetahuan. Penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan kekerasan serta penghormatan terhadap hak dan martabat setiap mahasiswa.**

5. **Pihak Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT), atas peran dan upaya yang dilakukan dalam mendukung terciptanya lingkungan perguruan tinggi yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.**

Keberadaan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan menjadi hal penting dalam memberikan pemahaman mengenai perlindungan serta hak mahasiswa di lingkungan kampus.

6. **Orang tua dan keluarga, yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, motivasi, serta semangat kepada penulis selama menjalani pendidikan dan menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Dukungan tersebut menjadi dorongan bagi penulis untuk terus belajar, berusaha, dan menyelesaikan tanggung jawab akademik dengan sebaik-baiknya.**
7. **Rekan-rekan satu kelompok, yang telah bekerja sama, berdiskusi, bertukar pendapat, membagi tugas, serta saling membantu dalam setiap tahapan penyusunan karya tulis ilmiah ini. Kerja sama dan tanggung jawab bersama menjadi bagian penting dalam menyelesaikan penelitian, mulai dari penentuan topik, pengumpulan informasi, pelaksanaan wawancara, analisis hasil, hingga penyusunan laporan akhir.**
8. **Teman-teman mahasiswa, yang telah memberikan dukungan, masukan, dan semangat selama proses penyusunan karya tulis ilmiah ini. Berbagai pandangan dan diskusi yang dilakukan turut membantu memperluas pemahaman penulis mengenai pentingnya membangun budaya organisasi mahasiswa yang sehat, saling menghormati, dan tidak membenarkan tindakan kekerasan atas dasar senioritas.**
9. **Seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pengumpulan informasi, pencarian referensi, diskusi, serta penyelesaian karya tulis ilmiah ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.**

Penulis menyadari bahwa penyusunan karya tulis ilmiah ini merupakan proses pembelajaran yang membutuhkan ketelitian, kerja sama, dan keterbukaan terhadap berbagai pandangan. Setiap bantuan, saran, dan informasi yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut memiliki arti penting dalam mendukung penyelesaian penelitian ini.

Melalui karya tulis ilmiah ini, penulis berharap pembahasan mengenai peran PPKPT, senioritas, dan penyalahgunaan relasi kuasa dapat menambah wawasan serta

meningkatkan kesadaran seluruh sivitas akademika mengenai pentingnya menciptakan lingkungan kampus yang aman dan kondusif. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan agar senantiasa mengedepankan nilai-nilai kesetaraan, tanggung jawab, penghormatan terhadap martabat manusia, serta keberanian untuk mencegah dan melaporkan tindakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. Semoga segala bentuk dukungan dan kontribusi yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan mendukung terwujudnya lingkungan Universitas Bangka Belitung yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan pada masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

JURNAL

Hermawati, Y., Widiyanto, W., Santoso, E., & Nuryanti, N. (2023). *The Framework of Handling Sexual Violence in Indonesian Universities*. Komunitas, 15(2). https://doi.org/10.15294/komunitas.v15i2.47668(Hermawati, Y., Widiyanto, W., Santoso, E., & Nuryanti, 2023)

Legal Protection for Victims of Harassment in a Victimological Perspective (Case Study of Harassment in Higher Education Institutions). *Law Research Review Quarterly*, *9*(2), 129-152. https://doi.org/10.15294/lrrq.v9i2.65795(Yanto, D., Holish, A. M., & Setiawan, 2019)

Rahmasari, H., Pradityo, R., Karinda, R., Sitepu, S., & Widyawati, A. (2023). Policies on Prevention and Repression Against Sexual Violence for Higher Education: The Challenges and Expectations. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, *8*(1), 57-74. https://doi.org/10.15294/ijcls.v8i1.36753(Rahmasari, H., Pradityo, R., Karinda, R., Sitepu, S., & Widyawati, 2018)

State Institution and Socio Analysis on Sexual Violence in Higher Education. (2026). *Pandecta Research Law Journal*, *21*(1), 139-174. https://doi.org/10.15294/pandecta.v21i1.25693(State Institution and Socio Analysis on Sexual Violence in Higher Education. (2026), 2026)

PERATURAN PERUNDAN-UNDANGAN

Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi*.(Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2024)